KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT KAMPUNG KAMORFUAR DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Iswahyudi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

Email : Iswahyudi@iyb.ac.id

Abstrak

Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kepemimpinan kepala kampung dalam penyediaan air bersih. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah kebijakan yang diambil oleh Kepala Kampung Kamorfuvar pun tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak melenceng dari undang-undang, ini diakui oleh Sekertaris Kampung Kamorfuvar. Kebijakan diputusan berdasarkan kebutuhan, artinya semua tahapan pengambilan kebijakan dalam penyediaan air bersih adalah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat kampung.

Kata Kunci: Kebijakan, Kepemimpinan dan Kepala Kampung.

PENDAHULUAN

Optimalisasi kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan merupakan hal pokok dalam menjalankan roda pemerintahan. Dilihat dari peranannya yang paling menonjol pada efektifitas roda pemerintahannya ialah kepemimpinan. Kepemimpinan pemerintahan selalu berkaitan dengan pelayanan publik yang mengarah pada keterbukaan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan masyarakatnya. Gaya kepemimpinan yang lebih efektif dan efisien akan berpengaruh sangat baik pada alur pemerintahannya, seperti tegas dan jujur dalam menjalankan suatu jabatan. Berkaitan dengan semua ini secara umum pemerintahan adalah suatu lembaga organisasi yang bertanggungjawab atas semua kepengurusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat baik itu lembaga

pemerintahan itu sendiri maupun badan usaha milik negara yang berkaitan.

Peranan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sangat berpengaruh menuju pembaharuan, dimana letak perubahannya bukan saja pada masyarakatnya melainkan juga berada pada pemerintahnya. Berbicara tentang pemerintahan kampung adalah persoalan yang tidak asing lagi untuk dikaji oleh peneliti. Pemerintahan kampung adalah lembaga pemerintahan kecil yang tugas dan fungsinya mengatur, menertibkan, serta mensejahterakan warga masyarakat yang hidup pada lingkungan tersebut, sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Lembaga pemerintahan kampung memiliki peranan yang sangat besar guna menjawab kebutuhan hidup masyarakatnya berupa bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara, melalui pemerintahan kampung

maka niscaya akan menjangkau seluruh masyarakat terkecil dan kurang mampu yang ada diwilayah masing-masing. Tidak hanya itu, pemerintah kampung juga harus memiliki peranan yang berpengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat, maka untuk mencapai cita-cita ini, pemerintah kampung dituntut untuk mampu mengolah dan memberi nilai jual yang cukup tinggi bagi ketersediaan sumber daya alam yang berada pada lingkungan sekitar kampung guna membantu ekonomi masyarakatnya.

Oleh karena itu pemerintah kampung akan selalu berupaya menemukan beragam cara dan solusi untuk menjawab permasalahan yang dikeluhkan oleh warganya. Tentu saja ini akan menjurus pada kepemimpinan kepala kampung serta aparat kampungnya. Kepala kampung memiliki peranan besar dalam menjangkau dan mengarahkan masyarakat kampung kearah yang lebih baik, dalam artian bahwa masyarakat kampung dibawah pimpinan kekuasaanya. Birokrasi pemerintah kampungnyapun perlu menjadi sorotan, bahwa birokrasi pemerintahan kampung yang baik akan menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien, agar tertibnya aturan yang diberlakukan sesuai dengan kondisi masyarakat kampung tersebut, bahwa segala kepengurusan dengan gaya kepemimpinan kepala kampung yang birokratis mampu menjangkau masyarakatnya.

Pemerintahan kampung yang baik adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi aspirasi masyarakat dan taat pada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis akan mencoba mengkaji kebijakan kepemimpinan kepala kampung pada Kampung Kamorfuar Distrik Samofa Di Kabupaten Biak Numfor. Pada Kampung Kamorfuar, kepala pemerintahannya

dikepalai oleh seorang kepala kampung, yang sudah pasti bertanggung jawab penuh atas kelangsungan kesejahteraan masyarakat Kampung Kamorfuar. Faktor yang mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan yang baik adalah kebijakan kepemimpinan dari Kepala Kampung itu sendiri. Dalam hal ini kepala kampung dituntut untuk mengabil suatu kebijakan langkah yang maksimal dalam menyelesaikan masalah yang tengah terjadi pada masyarakat Kampung Kamorfuar. Berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kampung diperlukan fasilitas yang menunjang kebutuhan hidup, terlebih lagi pada suatu kampung, yang mana memiliki suatu masalah yang hingga kini perlu menjadi perhatian khusus bagi kepala kampung kamorfuar, yaitu keterbatasan dalam menjangkau air bersih guna dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kebijakan kepemimpinan Kepala Kampung sangat berpengaruh pada masalah keterbatasan air bersih yang belum maksimal dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat Kampung Kamorfuar.

Kebijakan publik adalah strategi untuk menghantarkan masyarakat pada awal memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. Kebijakan publik merupakan sebuah fakta strategis dari pada fakta politis maupun fakta teknis. Sebagaimana sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan ,khususnya pada proses perumusan. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik. Lembaga publik adalah lembaga yang didanai dari dana/uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau

pungutan-pungutan lain yang ditetapkan secara formal. Sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja.

Kebijakan harus di awasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung-jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan publik. Menurut William N. Dunn (2003), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan rincian penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Konsep kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2009). Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Terdapat tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu: (a) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (b) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pimpinan dan anggota

kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (c) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasikan kepemimpinan.

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar-individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kampung Kamorfuar Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.

Jenis Penelitian

Berhubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan ciri menggunakan setting alami, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, menggunakan pendekatan induktif, dan memberikan perhatian kepada makna.

Sumber Data

Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi (pengamatan), dan interview (wawancara), kepada responden, yang diperoleh langsung dan belum diolah sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan dengan para informan kunci yang mengetahui masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian. Melalui wawancara diharapkan diperoleh suatu gambaran umum yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai bahan untuk perbandingan hasil pengamatan dan pedoman selanjutnya dalam wawancara mendalam.

2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi atau pengamatan langsung adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap objek yang diteliti melalui pengamatan secara langsung dan jelas tentang keadaan yang sebenarnya dan memperoleh gambaran objek yang diteliti secara nyata dan benar.

3. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik bahasan, bersumber dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan diktat dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh didapatkan melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan konsentrasi ilmu yang sesuai. Kebijakan dalam suatu kepemimpinan adalah berarti seorang pemimpin melakukan sebuah tindakan untuk memproses suatu masalah yang dihadapi, tentunya tindakan langkah strategi tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, artinya mengutamakan musyawarah mufakat dan tidak keluar dari undang-undang yang berlaku. Kebijakan kepemimpinan adalah sebuah strategi yang diambil sebagai sebuah solusi untuk suatu masalah, dengan kebijakan kepemimpinan, sang pemimpin dituntut memainkan peranan dan tugas serta fungsinya agar suatu tindakan langkah dapat dijalankan dasar acuan penyelesaian masalah tersebut, bahwa kebijakan tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan pantas dilakukan karena kebijakan kepemimpinan ini keluar dari seorang pemimpin yang berwenang. Oleh karena itulah peneliti akan menguraikan hasil penelitian lapangan sesuai dengan masalah yang dikaji yaitu melihat kebijakan kepemimpinan Kepala Kampung Kamorfuar Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, dalam penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kampung yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati dan menggunakan air bersih.

A. Kebijakan Kepemimpinan Kepala Kampung Kamorfuar Dalam

Penyediaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat Kampung Kamorfuor.

Beberapa pertanyaan kemudian berkembang dari rumusan masalah *bagaimana kebijakan kepemimpinan kepala kampung dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Kampung Kamorfuor.*

".....Sebagaimana telah diketahui bersama air merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan sebagai makhluk yang hidup dimuka bumi ini terutama kehidupan manusia dan masyarakat luas. Melihat keterbatasan air bersih ini kami telah melakukan beberapa tindakan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu melakukan kerja sama dengan perusahaan air minum daerah di Kabupaten Biak Numfor ini yaitu PT.Warbesrendi Biak pada tahun 2015 sudah dilakukan pipanisasi ke keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan jalur pipanisasi air bersih dari PT.Warbesrendi, melalui anggaran dana desa pertama kali di tahun 2015 dimana merupakan tahun berdirinya Kampung Kamorfuor secara defenitif, dipergunakan untuk memberikan jalur pipanisasi yang dikerjakan oleh perusahaan air minum daerah.

Pemberian informasi dari langkah kebijakan dalam kepemimpinannya selaku Kepala Kampung Kamorfuor. Kebijakan kepemimpinan adalah semata-mata merupakan langkah strategi dalam penyelesaian masalah diberbagai bidang. Selain dari pada kepala kampung terdapat juga sekertaris kampung yang turut menjadi bahagian dalam melaksanakan kebijakan kepemimpinan, yang berarti bahwa dalam realisasinya kepala kampung tidak bertindak

sendiri, tetapi melibatkan staf bawahannya. Dari sinilah peneliti juga mengambil data melalui wawancara bersama Sekertaris Kampung Kamorfuor yaitu bapak **David R.Padwa**, dengan 2 (dua) pertanyaan dan jawaban sebagai berikut. Apa sajakah yang pernah sudah dilakukan untuk peyediaan air bersih bagi warga Kampung Kamorfuor yang tidak mendapatkan air bersih.

".....Bertindak sebagai sekertaris kampung kamorfuor mengatakan bahwa kampung kamorfuor ini terletak didaerah dataran yang tinggi, sehingga kebutuhan air bersih itu sangat penting. Maka BUMD dalam hal ini PT.Warbesrendi telah menyediakan fasilitas untuk mendapatkan air bersih, namun sampai dengan saat ini ada sebagian warga yang tidak menikmati air bersih dikarenakan air tidak dialirkan disalurkan dengan baik, bahkan sangat jarang mengalir. sehingga tidak dapat dipungkiri masyarakat akhirnya menggunakan air hujan untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing.Pada tahun 2016 ada satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah kampung kamorfuor yaitu pemasangan meteran pipa air bersih oleh Perusahaan Air Minum Daerah PT.Warbesrendi dan yang diberikan kesempatan adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga. Dengan langkah kebijakan ini sudah sedikit menjawab masalah air bersih yang terbatas, namun karena tidak semua Keluarga mendapatkan kesempatan memperoleh meteran air agar tersalurnya air bersih, maka kemudian pemerintah kampung mencoba mengambil kebijakan lain bersama kepala kampung sebagai pemimpin yaitu adalah membuat sumur bor yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kampung kamorfuor.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kampung Kamorfuor dan Sekertaris Kampung Kamorfuor

sebagaimana kebijakan kepemimpinan kepala kampung dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat kampung kamorfuar ini, maka dapat bisa dipastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah menyediakan sumur bor yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kampung kamorfuar, mereka dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan air bersih untuk dikonsumsi dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kebijakan penyediaan sumur bor masih dalam tahapan perencanaan, ini berarti penyediaan sumur bor tersebut belum ada sampai dengan saat ini, sehingga masyarakat masih aktif menggunakan air hujan sebagai pemenuhan kebutuhan, hal inilah yang harus diperhatikan.

Setelah berhasil mewawancarai Kepala Kampung dan Sekertaris Kampung, peneliti juga mengambil data informasi melalui respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kampung terhadap penyediaan air bersih yang sampai saat ini belum ada. Sebanyak 3 (tiga) orang warga masyarakat kampung yang kemudian peneliti wawancara sebagai bahan acuan dasar untuk melihat sejauh mana kepala kampung dalam kepemimpinannya mengambil sebuah kebijakan dalam suatu masalah melalui pendapat warganya.

B. Penyusunan Agenda Pembuatan Kebijakan Dalam Kepemimpinan.

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah issue berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka issue

tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada issue lain. Kepemimpinan Kepala Kampung Kamorfuar sebagai sumber pembuatan keputusan atas permasalahan yang dihadapi menjadi sorotan terpenting, oleh karena langkah kebijakan yang diambil dan dilaksanakan harus bersumber dari seorang yang memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan tersebut. Untuk pemenuhan air bersih demi kebutuhan bersama masyarakat kampung. Bertindak sebagai sosok pemimpin pemerintahan kampung Yunus F.Sada dalam melakukan tindakan kebijakan terlebih dahulu memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakatnya, dengan demikian hal tersebut dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dengan terlebih dahulu mengagendakannya sebagai sebuah issue yang kemudian akan menjadi masalah yang perlu untuk ditangani. Hal ini dapat terlihat pada penjelasannya bahwa dalam penanganan keterbatasan air bersih merupakan masalah yang tidak bisa disepeleahkan, karena air merupakan salah satu kebutuhan mendasar hidup manusia.

Melihat dan mendengar keluhan, saran dan kritikan kemudian kepala kampung mengagendakan keterbatasan air bersih ini akan diprogramkan sebagai rencana kerja pemerintah kampung sebagai bukti bahwa pemerintah kampung benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Apabila nantinya keterbatasan air bersih menjadi masalah yang memerlukan solusi, kepala kampung kamorfuar akan menggunakan wewengannya sebagai sosok pemimpin untuk menginstruksikan para staf dan bawahannya bahwa penyediaan air bersih merupakan masalah yang perlu untuk diselesaikan.

Jika Kepala Kampung Kamorfuor menginstruksikan bahwa akan dibuat suatu kebijakan, beliau tidak akan bertindak semena-mena tetapi di setiap kebijakannya selalu mengedepankan musyawarah mufakat, dimana dalam memutuskan sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat sesuai oleh karena kebijakan tersebut ada berdasarkan persetujuan banyak orang dalam hal ini para staf dan Badan musyawarah kampung pada Kampung Kamorfuor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan menganalisisnya dengan berpegang pada teori murni, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah, kebijakan kepemimpinan merupakan hal mendasar yang menjadi patokan sebuah penyelesaian masalah yaitu menemukan solusi yang pantas bagi masalah yang dihadapi. Sumber kebijakan kepemimpinan merupakan sorotan utama dalam penelitian ini, karena yang berperan penting dalam penetapan dan pembuatan kebijakan adalah seorang pemimpin dimana kewenangannya digunakan dalam penyelesaian suatu masalah. Kebijakan kepemimpinan yang diambil oleh kepala kampung dalam keterbatasan sumber daya air bagi warga kampung kamorfuor, memiliki andil besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat kampung kamorfuor.

DAFTAR PUSTAKA

Erwan Agus Purwanto, Sulistyastuti Ratih Dyah, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Gava Media

H.A.R Tilaar, Nugroho Riant, 2008 *Kebijakan Pendidikan*, Pustaka Pelajar

Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Sinar Grafika

Muhadjir, Noeng, 2004, *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian Kebijakan, Dan Perencanaan*, Rake Sarasin

Nugroho Riant, 2013, *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Pelajar

Nugroho Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta, Exel Media Komputindo

Rivai Vetzhal, Mulyadi Deddy, 2009, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT.RajaGrafindo Persada Jakarta.

Syafiie Kencana Inu, 2003, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, PT.Refika Aditama

Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo